



LAPORAN KINERJA (LKj)

Tahun 2019

**Jl. Perintis Kemerdekaan No. 113 Kel.
Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai
Sumatera Utara 20743**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2019 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2019 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2019 yang tertian dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian visi dan misi Dinas. Laporan Kinerja (LKj) ini mencakup uraian pencapaian perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019.

Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, LKj ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah - langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih professional dan transparan yang berguna bagi masyarakat. Masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan bagi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) ini selanjutnya. Demikian kiranya mudah - mudahan Allah SWT senantiasa dapat memberikan bimbingan bagi kita semua.

Binjai, 2019

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI



TOBERTINA, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611015 199203 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	I
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Gambaran Umum	2
I.3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
I.4. Sumber Daya Aparatur	9
I.5. Sarana dan Prasarana	10
I.6. Sistematika Laporan Kinerja (LK)	14
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	 16
II.1. Rencana Strategis	16
II.2. Tujuan dan Sasaran	17
II.3. Perjanjian Kinerja	20
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 22
III.1. Capaian Kinerja	23
III.2. Realisasi Anggaran	25
 BAB IV PENUTUP	 29
 LAMPIRAN :	
LAMPIRAN I	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019
LAMPIRAN II	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bias terus ditingkatkan. LKj Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.

Analisa dan bukti – bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pemangungan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indicator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2019 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data – data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai kedepan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan – persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bias dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai di lingkungan pemerintah Kota Binjai dalam perbaikan pelayanan public di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai merupakan bagian dari suatu tatanan Pemerintahan di Kota Binjai yang mempunyai peranan membantu Kepala Daerah dalam Pembangunan di bidang Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan, bertindak mewakili kepentingan seluruh masyarakat, sehingga dalam menjalankan peranan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sebagai salah satu instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai harus menyusun laporan kinerja setiap tahun dalam rangka mempertanggungjawabkan atau mengukur sejauh mana keberhasilan maupun kegagalan misi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas yang dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar.

Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan adanya sistem yang digunakan untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja ini diharapkan bisa mengubah paradigma instansi pemerintah, yang semula hanya berorientasi pada uang (input oriented) menjadi orientasi pada hasil (result oriented) serta dapat di pertanggungjawabkan.

Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaannya program dan kegiatan berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi.

Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha – usaha yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan out put maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dipimpin atau dikepalai oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan Kota Binjai.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, dan pasar.
- d. Pelaksanaan adminstrasi dinas di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, dan pasar.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. 2. GAMBARAN UMUM

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 35 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kota Binjai. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No 113 Binjai 20743.

Berikut ini adalah struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Ketenagakerjaan
 - a. Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja
 - b. Seksi Hubungan Industrial Persyaratan Kerja
 - c. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
4. Bidang Perindustrian
 - a. Seksi Industri Kecil Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur
 - b. Seksi Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang dan Aneka dan Kerajinan
 - c. Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut
5. Bidang Perdagangan
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
 - b. Seksi Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen
 - c. Seksi Pengelolaan Pasar

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas dibantu oleh :

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Tenaga Kerja
3. Kepala Bidang Perindustrian
4. Kepala Bidang Perdagangan

I.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. **Sekretaris** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perbendaharaan mengkoordinasikan bidang bidang dan urusan umum lainnya.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi dan pelaporan.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian.
- d. Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja.
- e. Mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur sesuai tugas dan fungsi.
- f. Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD).
- g. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan kepegawaian Dins.
- h. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- i. Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- j. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas.
- k. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada para Kepala Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- l. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum.
- m. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian.
- n. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset.
- o. Mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan.
- p. Melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset.
- q. Menginventarisir permasalahan – permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya.
- r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
- s. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja (LK), Perjanjian Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- t. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan.

- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

2. **Bidang Ketenagakerjaan** mempunyai tugas pokok membantu dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan kegiatan ketenagakerjaan.
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan.
- d. Melaksanakan perluasan kesempatan kerja dan pemagangan.
- e. Melakukan penempatan dan informasi pasar kerja.
- f. Melakukan pelatihan tenaga kerja, perizinan dan sertifikasi lembaga latihan kerja.
- g. Melakukan hubungan industrial dan persyaratan kerja.
- h. Mengevaluasi perselisihan hubungan industrial dan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha.
- i. Merencanakan, mengevaluasi persyaratan kerja dan jamsostek.
- j. Melakukan perencanaan hubungan industri.
- k. Mengkoordinir tugas seksi pelatihan produktivitas kerja, seksi hubungan industrial persyaratan kerja dan seksi penempatan tenaga kerja.
- l. Menilai hasil kerja bawahan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Bidang Perindustrian** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang perindustrian.

Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

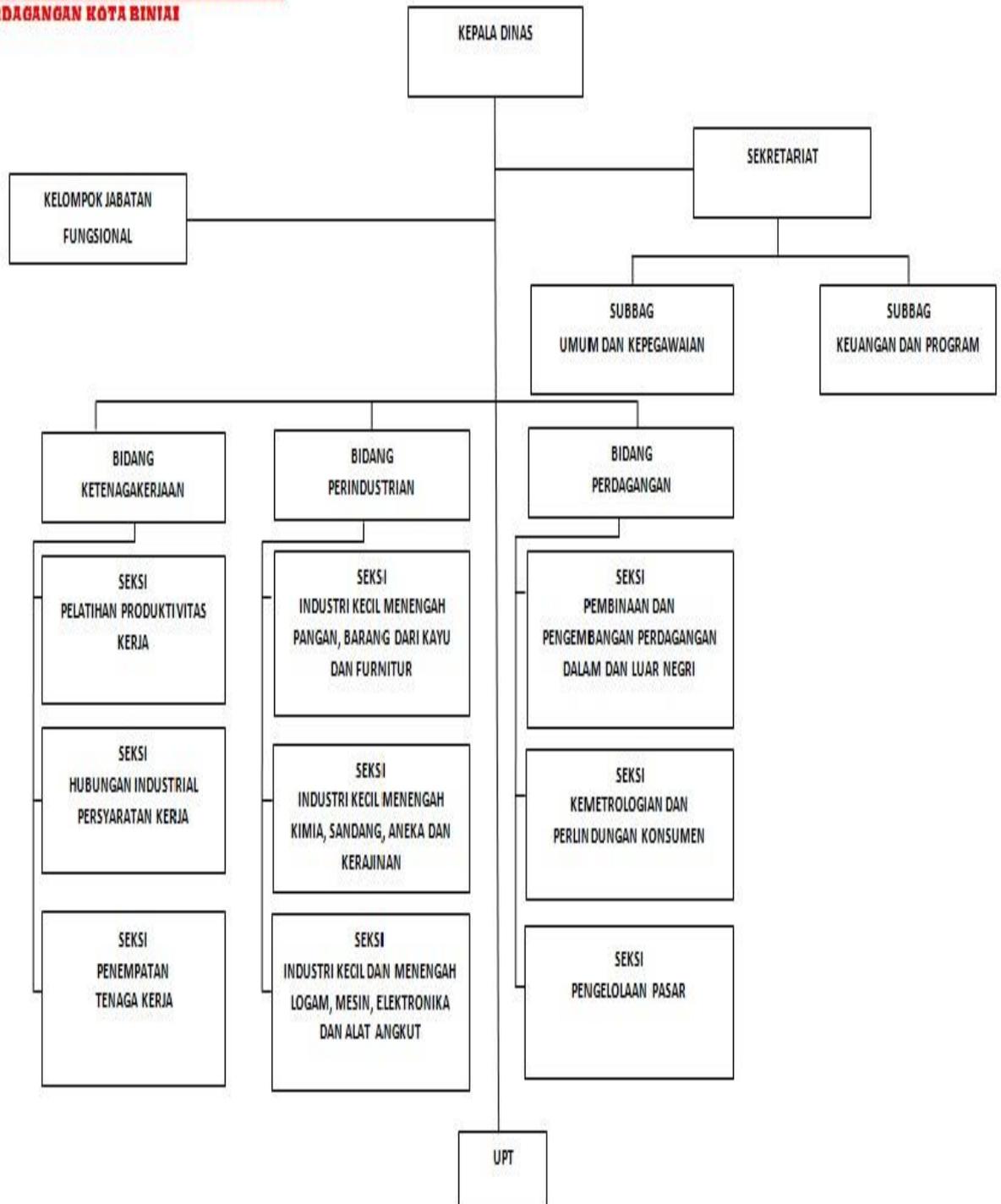
- a. Menyusun program dan rencana kerja.
- b. Melaksanakan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri.

- c. Melaksanakan pembangunan SDM industri, wirausaha industri, tenaga industri, pembina industri dan konsultan industri.
 - d. Mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan industri.
 - e. Melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi Industri Kecil Menengah (IKM), peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi serta elektronika dan telematika.
 - f. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan menengah, peningkatan daya saing, dan standarisasi industri dan teknologi industri, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, serta elektronika dan telematika.
 - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra, dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, serta elektronika dan telematika.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Bidang Perdagangan** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang perdagangan.
- Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
 - b. Mempersiapkan Standar Operasional Prosedur pada setiap pelaksanaan tugas.
 - c. Mempersiapkan konsep tentang pemberian izin usaha perdagangan.

- d. Merumuskan dan penetapan kebijakan di bidang perdagangan.
 - e. Mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.
 - f. Mempersiapkan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, pemberian bimbingan di bidang perdagangan.
 - g. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan memonitoring, mengevaluasi izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung.
 - h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang), dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konversi dan seminar dagang) skala lokal.
 - i. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, serta pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dalam pangan.
 - j. Menyelenggarakan pembinaan/pengawasan metrologi legal, serta mengadakan penyuluhan dan pengamatan barang dalam keadaan terbungkus dan sistem internasional.
 - k. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan sebagai pertanggungjawaban.
 - l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- 5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)** mempunyai tugas pokok dan fungsi yang ditentukan dan ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BERIKUT BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOTA BINJAI**



I.4. SUMBER DAYA APARATUR

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan. Untuk mewujudkan misi yang diemban, kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai pada Tahun 2019 sebanyak 40 (empat puluh) orang Pegawai (PNS) yang terdiri dari 18 (delapan belas) laki-laki dan 22 (dua puluh dua) perempuan dengan status kepegawaian dan strata/jenjang pendidikan mulai dari SMA hingga S-2. Berikut ini kami sampaikan data kepegawaian seperti terlihat pada tabel berikut ini :

- ✚ Komposisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berdasarkan Status dan Pangkat/Golongan Pegawai

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1.	PNS	40
2.	CPNS	-
3.	Honorar	67
	Jumlah	107

Sumber : Daftar Hadir Pegawai 2019

No	Golongan	Jumlah
1.	I / b	1
2.	II / a	-
3.	II / b	-
4.	II / c	2
5.	II / d	3
6.	III / a	5
7.	III / b	6
8.	III / c	8
9.	III / d	7
10.	IV / a	7
11.	IV / b	2
12.	IV / c	-
	Jumlah	40

Sumber : Daftar Hadir Pegawai 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	3
2.	S1	24
3.	D – IV	-
4.	D – III	3
5.	SLTA	8
6.	SLTP	1
7.	SD	1
	Jumlah	40

Sumber : Daftar Hadir Pegawai 2019

I. 5. SARANA DAN PRASARANA

Lokasi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai yang berada diluar kompleks Pemerintahan Kota Binjai berpengaruh terhadap volume kebutuhan barang dan jasa yang digunakan. Barang dan jasa yang diperlukan meliputi penggunaan untuk operasional kegiatan dan pemeliharaan sarana yang dimiliki. Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai kepada masyarakat.

Sarana Prasarana yang dimaksud meliputi sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kota Binjai sebagai peralatan kerja dinas dan sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kota Binjai sebagai infrastruktur publik. Kondisi sarana prasarana sebagai alat kerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Bidang	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi
Sekretariat	Gedung Kantor	2 unit	Sedang
	Kendaraan roda dua	2 unit	Baik dan sedang
	Komputer, Laptop	1 unit, 3 unit	Baik
	Printer	3 unit	Baik

Bidang	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi
Ketenagakerjaan	Komputer	8 unit	Baik
	Laptop	1 unit	Baik
	Printer	2 unit	Baik
	Kendaraan roda dua	3 unit	Baik
Industri	Komputer	3 unit	Baik
	Printer	2 unit	Baik
	Laptop	2 unit	Baik
	Kendaraan roda dua	2 unit	2 baik
	Kamera	2 unit	1 Baik
Perdagangan	Komputer	1 unit	Baik
	Printer	2 unit	Baik
	Laptop	3 unit	Baik
	Kendaraan roda empat	2 unit	Baik
	Kendaraan roda dua	16 unit	16 Sedang

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN	1.655.164.237,00	1.655.164.237,00	0,00	0,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.655.164.237,00	1.655.164.237,00	0,00	0,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.655.164.237,00	1.655.164.237,00	0,00	0,00
5	BELANJA	6.147.470.350,00	10.462.395.464,00	4.314.925.114,00	70,19
5.1	Belanja Tidak Langsung	2.867.666.990,00	3.161.856.104,00	294.189.114,00	10,26
5.1.1	Belanja Pegawai	2.867.666.990,00	3.161.856.104,00	294.189.114,00	10,26

5.2	Belanja Langsung	4.579.035.957,00	9.503.158.957,00	4.924.123.000,00	107,54
5.2.1	Belanja Pegawai	124.370.000,00	157.830.000,00	33.460.000,00	26,90
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.143.295.160,00	3.282.953.360,00	139.658.200,00	4,44
5.2.3	Belanja Modal	12.138.200,00	3.859.756.000,00	3.847.617.800,00	
SURPLUS/ (DEFISIT)		(4.492.306.113,00)	(8.807.231.227)	(4.314.925.114,00)	96,05

Dalam hal penegakan Hukum di Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai telah mempunyai 4 (empat) orang aparat Pengawas Ketenagakerjaan yang mana 2 (dua) orang diantaranya telah mempunyai sertifikasi PPNS Ketenagakerjaan, 1 (satu) orang aparat Mediator yang telah mempunyai sertifikasi dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2016 yaitu : Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Dewan Pengupahan.

Untuk mendapatkan kepastian Hukum terutama dalam bidang ketenagakerjaan bagi Pengusaha dan Pekerja maka secara rutin melakukan Pengawasan ke Perusahaan dan menindaklanjuti laporan Pekerja dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), begitu juga dalam hal Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Binjai untuk Tahun 2018.

Berikut kami sajikan perkembangan Upah Minimum Kota Binjai.

Tahun	UMK
2011	1.050.000,00
2012	1.201.500,00
2013	1.379.000,00
2014	1.560.000,00
2015	1.700.000,00
2016	1.895.500,00
2017	2.051.875,75
2018	2.230.597,39
2019	2.409.714,36

NO	JENIS PRODUK	SATUAN	JUMLAH
1	Anyaman Bambu	Buah	2.393.101
2	Sulaman Border	Potong	149.270
3	Meubel Bambu	Set	87.056
4	Barang-Barang Tekstil	Kodi	921.922
5	Kerupuk/Opak	Bungkus/Kg	140.180.929
6	Tenun	Helai	2.489

- Pelatihan bagi pelaku IKM
- Memfasilitasi kerja sama antara industri kecil dengan industri menengah dalam pemasaran produknya

1. Permasalahan Utama

a. Bidang Ketenagakerjaan

Dalam mempersiapkan Tenaga Kerja yang terampil dan kompeten kami berusaha melaksanakan Pelatihan – pelatihan agar para pekerja mampu bersaing apabila mereka nantinya bekerja ataupun berwira usaha, namun kendala yang dihadapi, masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, begitu juga tenaga pengajar yang berkompeten dibidangnya sama sekali tidak ada, ini bisa menjadi perhatian karena untuk menciptakan Tenaga Kerja yang terampil tentu saja diperlukan juga sarana pelatihan dan Pengajar yang baik, dalam hal pengawasan dan penyelesaian masalah – masalah Ketenagakerjaan kami menghadapi masalah dalam hal keberanian Pekerja mengatakan berapa upah yang diterimanya.

b. Bidang Perindustrian

1. Kurangnya tenaga terampil dalam mengembangkan Produk unggulan di Industri Kecil dan Menengah.
2. Industri Kecil Menengah kurang memahami manajemen kewirausahaan dan belum optimal mengembangkan industri kreatif.

3. Belum optimalnya data industri sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan.
 4. Kurangnya informasi bagi investor (pelaku usaha) untuk mengenal potensi komoditi andalan.
 5. Kurangnya mesin/peralatan
- c. Bidang Perdagangan
1. Minimnya sumber daya aparatur yang telah memperoleh pendidikan khusus dibidang perdagangan secara memadai.
 2. Kewenangan dalam pengawasan dan penindakan belum didukung oleh Peraturan – peraturan dan Undang – undang yang memadai.
 3. Informasi tentang produk – produk dalam negeri belum optimal.
 4. Daya saing hasil industri Kecil Menengah (IKM) masih lemah.
 5. Masih perlunya ditingkatkan kualitas produk IKM dan kurangnya pemanfaatan tekonologi untuk memberikan nilai tambah.
 6. Belum optimalnya pengawasan distribusi barang dan harga.
 7. Belum adanya perencanaan terpadu dalam pengendalian harga di pasar.

I.6. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA(LK) 2019

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika Penyusunan Laporan Kinerja ini terdiri dari :

IKHTISAR EKSEKUTIF :

Bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sejauh mana Pemerintah Daerah telah mencapai tujuan dan sasaran tersebut serta kendala – kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya, langkah – langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut termasuk juga kendala – kendala yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019.

Uraian singkat masing-masing bab dalam laporan ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam hal ini diuraikan penjelasan umum Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai yang terdiri dari : Latar Belakang, Gambaran Umum, Sumber Daya Aparatur, Keadaan dan Prasarana, Aspek Strategis dan Permasalahan Utama dan Sistematika Laporan Kinerja (LK) 2019.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menggambarkan bentuk Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang merupakan ringkasan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2016 – 2021 terdiri dari : Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dan dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menggambarkan akuntabilitas kinerja yang mencakup Pengukuran Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

Bab IV : Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari dasarnya laporan kinerja instansi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai tahun 2019 ini serta menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Pada prinsipnya Perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari Kebijakan dan Program Pemerintah Kota Binjai dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dengan demikian, Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2016 – 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

Sejalan dengan itu, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai diharapkan mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat yang berorientasi pada pelayanan publik yang baik. Sehingga sangat diperlukan profesionalisme aparatur, transparansi, kredibilitas aparatur serta partisipasi dan dukungan masyarakat secara luas dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.1.1 Tujuan

Tujuan urusan perdagangan telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi Kota Binjai. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Tujuan akan mengarahkan penyusunan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai adalah :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
2. Menciptakan masyarakat maju, mandiri dan berdaya saing.
3. Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan potensi SDA dan kualitas serta produktifitas SDM.
4. Mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masyarakat yang sejahtera berkeadilan.

Dan adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan tersebut dituangkan dalam indicator kinerja utama (IKU).

Indicator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Penempatan tenaga kerja	Orang	275	361	131,27 %
2.	Jumlah calon wirausaha baru	Orang	120	60	50 %
3.	Jumlah lowongan pekerjaan baru	Perusahaan	350	361	100 %

4.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Orang	1.050	2.064	196,57 %
5.	Jumlah kasus perselisihan industrial yang diselesaikan	Kasus	10	4	Menurun
6.	Terbitnya UMK	Ketetapan	1	1	100 %
7.	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan	Orang	250		
8.	Persentase pengembangan industri baru kreatif	Persen	3	2	2 %
9.	Jumlah produk IKM yang di promosikan	Produk	8	8	100 %
10.	Tersedianya data IKM	IKM	650	714	110 %
11.	Jumlah pasar yang direvitalisasi	Pasar	3	2	90 %
12.	Jumlah pasar dalam keadaan baik	Pasar	16	13	81,25 %
13.	Sampah pasar yang diangkut ke TPA	Persen	100	85	85 %
14.	Pengumpulan data informasi harga kebutuhan bahan pokok	Komoditi	34	34	100 %
15.	Jumlah produk unggulan yang dipasarkan	Produk	6	6	100 %
16.	Peningkatan penjualan hasil kerajinan IKM melalui kegiatan pameran	Persen	15	10	10 %
17.	Persentase realisasi retribusi pasar yang dipungut	Persen	100	51,56	51,56 %
18.	Terlaksananya kegiatan ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya	UTTP	2300	675	29,35 %

2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Untuk itulah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai telah merumuskan sasaran berikut indikator- indikator keberhasilannya:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatnya produktifitas perekonomian kota.

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka tingkat capaian kinerja kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelayanan administrasi perkantoran - Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan - Sarana dan prasarana yang terjaga dengan baik - Aset kantor yang layak fungsi - Penyusunan dokumen perencanaan tahunan tepat waktu - Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu 	100 % 100 % 80% 80 % 2 dokumen (Renja, RKA) 2 dokumen (Lakip, Laporan keuangan)	100 % 90 % 70 % 70 % 2 dokumen (Renja, RKA) 2 dokumen (lakip, Laporan keuangan)	100 % 90 % 70 % 70 % 100 % 100 %
2.	Terwujudnya peningkatan kualitas	- Pemenuhan fungsi pengelolaan dan	20 perusahaan	15 perusahaan	75 %

	standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan	<ul style="list-style-type: none"> - penyebarluasan data dan informasi ketenagakerjaan untuk hubungan industrial - Pemenuhan fungsi pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi ketenagakerjaan untuk pelatihan - Jumlah calon wirausaha baru - Jumlah lowongan pekerjaan baru - Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 	100 orang	64 orang	64 %
			70 orang	10 orang	14 %
			361 orang	361 orang	131 %
3.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan terhadap pencari kerja dalam pembuatan AK1 s/d AK3 - Pelayanan kepada pedagang dalam penerbitan Kartu Pengenal Penyewa (KPP) 	1600 orang	1523 orang	95 %
			300 pedagang	273 pedagang	91 %
4.	Meningkatnya produktifitas perekonomian kota	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data IKM - Prosentase peningkatan kemampuan IKM yang mendapatkan pelatihan - Prosentase peningkatan penjualan hasil kerajinan IKM yang mengikuti pameran - Jumlah produk IKM yang di promosikan - Pengumpulan data informasi harga kebutuhan bahan pokok - Jumlah pasar yang direvitalisasi - Jumlah pasar dalam kondisi baik - Prosentase pemahaman pelaku usaha tentang kemetrolgian - Terlaksananya kegiatan ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya 	10 %	5 %	5 %
			10 %	5 %	5 %
			10 %	5 %	5 %
			100 %	8 produk	100 %
			34 jenis	34 jenis	100 %
			1 pasar	1 pasar	100 %
			22 pasar	17 pasar	77 %
			10 %	5 %	5 %
			1 pasar	1 pasar	100 %

II.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan hal yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja yang dilakukan instansi dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.

Perjanjian kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Ini berarti indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Indikator kinerja dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2019 merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam mendukung pencapaian visi misi Kota Binjai dalam melaksanakan program-program selama kurun waktu 2016 – 2020.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi amanah. Akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2019 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target – target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2019. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2019 disajikan dalam Bab ini.

Penyajian laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing – masing sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RENSTRA) dan RENJA tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara priodik.

3.1 Capaian Kinerja

Dinas Tenaga Kerja telah menetapkan indikator persentase lulusan peserta pelatihan yang memiliki keterampilan dan persentase jumlah masyarakat yang dibina dalam hal ketenagakerjaan. Hasil pengukuran terhadap indikator tersebut adalah sebagai berikut :

➤ **Tabel Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2019			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019
				Target	Realisasi	Realisasi %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan	- Pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi ketenagakerjaan untuk pelatihan	218 orang	250 orang	64 orang	25,6 %	260 orang	25,6 %
		- Jumlah lowongan pekerjaan baru	246 orang	350 orang	361 orang	103 %	350 orang	103 %
		- Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	246 orang	275 orang	361 orang	131 %	275 orang	131 %
		- Besaran upah minimum kota (UMK)	Naik	Naik	Naik	8 %	10 %	8 %
		- Jumlah kasus perselisihan industri yang disesuaikan	6 kasus	10 kasus	4 kasus	40 %	8 kasus	40%

➤ **Tabel Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2019			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019
				Target	Realisasi	Realisasi %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	- Pelayanan terhadap pencari kerja dalam pembuatan AK1	650 IKM	1.050	1.523	145 %	1.150	145 %
		- Pelayanan kepada pedagang dalam penerbitan Kartu Pengenal Penyewa (KPP)		235 pedagang	273 pedagang	116 %	260 pedagang	116 %

➤ **Tabel Sasaran Meningkatnya Produktifitas Perekonomian Kota**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2019			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019
				Target	Realisasi	Realisasi %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya produktifitas perekonomian kota	- Tersedianya data IKM	650 IKM	1.050	1.523	145 %	1.150	145 %
		- Prosentase peningkatan penjualan hasil kerajinan IKM yang mengikuti pameran	50 %	235 pedagang	273 pedagang	116 %	260 pedagang	116 %
		- Jumlah produk IKM yang di promosikan	100 %	8 produk	8 produk	10 %	9 produk	100 %

	- Pemenuhan informasi harga bahan pangan	34 jenis	34 jenis	34 jenis	100 %	34 jenis	100 %
	- Persentase realisasi retribusi pasar yang dipungut	51,13%	1.655.164.237	853.337.040	51,56 %	100 %	51,56 %
	- Jumlah pasar yang di revitalisasi	4 pasar	3 pasar	1 pasar	33 %	2 pasar	33 %
	- Jumlah pasar dalam kondisi baik	4 pasar	16 pasar	13 pasar	81 %	22 pasar	81 %
	- Sampah pasar yang diangkut ke TPA	13 pasar	100 %	70 %	70 %	100 %	
	- Terlaksananya kegiatan ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya	949 UTTP	2259	675	29 %	2320	

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019, untuk melaksanakan 7 program 27 kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.279.803.360,00,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kota Binjai. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 3.170.819.178,- (**96,6%**).

Pada Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai juga mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 3.900.736.000,00. Meskipun realisasi fisik nya 100%, namun realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan oleh karena adanya beberapa efisiensi penggunaannya seperti di perjalanan dinas, makan minum rapat/kegiatan, dan sebagainya. Adapun rincian dana tersebut diuraikan dibawah ini.

	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Unit Pengelola
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	729.179.300,00	702.748.023,00	96,3 %	Disnaker Perindag
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.900.000,00	39.900.000,00	100 %	Disnaker Perindag
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.250.000,00	144.605.366,00	96,8 %	Disnaker Perindag
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	102.838.500,00	91.441.000,00	88,9 %	Disnaker Perindag
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23.046.700,00	22.488.000,00	97,51%	Disnaker Perindag
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	88.800.100,00	87.302.000,00	98,3 %	Disnaker Perindag
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.724.000,00	79.204.800,00	99,3 %	Disnaker Perindag
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.995.000,00	99,9 %	Disnaker Perindag
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	70.620.000,00	69.608.000,00	98,5 %	Disnaker Perindag
	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	140.000.000,00	139.307.529,00	99,5 %	Disnaker Perindag
	- BPJS Ketenagakerjaan Non PNS	25.000.000,00	18.896.328,00	75,5 %	Disnaker Perindag

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	485.643.395,00	447.719.430,00	92,1 %	
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	37.000.000,00	37.000.000,00	100 %	Disnaker Perindag
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	36.600.000,00	36.575.000,00	99,9 %	Disnaker Perindag
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	360.282.395,00	324.824.430,00	90,1 %	Disnaker Perindag
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000,00	19.000.000,00	95,0 %	Disnaker Perindag
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	31.761.000,00	30.320.000,00	95,4 %	Disnaker Perindag
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	21.500.000,00	18.720.000,00	87,0 %	Disnaker Perindag
	- Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari tertentu	21.500.00,00	18.720.000,00	87,0 %	Disnaker Perindag
4.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	86.403.475,00	84.814.900,00	98,1 %	
	- Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	86.403.475,00	84.814.900,00	98,1 %	Disnaker Perindag
6.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	33.212.600,00	32.403.000,00	97,5 %	
	- Dewan Pengupahan	33.212.600,00	32.403.000,00	97,5 %	Disnaker Perindag
9	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.004.518.590,00	1.856.352.825,00	92,6 %	
	- Penyelenggaraan Promosi Dagang Tingkat Nasional (INACRAFT)	149.994.000,00	145.306.140,00	96,8 %	Disnaker Perindag
	- Kegiatan Pameran Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	149.594.000,00	145.761.895,00	97,4 %	Disnaker Perindag
	- Kegiatan Penyelenggaraan Stand Kota Binjai pada Pekan Raya Sumatera Utara	97.390.580,00	91.742.500,00	94,2 %	Disnaker Perindag
	- Kegiatan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok Hari Besar Idul Fitri	216.879.770,00	214.113.790,00	98,7 %	Disnaker Perindag

	- Penertiban dan Pengelolaan Pasar	426.474.880,00	415.937.300,00	97,5 %	Disnaker Perindag
	- Peningkatan Pelayanan Kebersihan Pasar	725.169.675,00	693.669.300,00	95,6 %	Disnaker Perindag
	- Pemberdayaan dan Penataan Pasar se Kota Binjai	137.475.685,00	129.821.900,00	94,4 %	Disnaker Perindag
	- Pembuatan Kontainer Sampah	81.540.000,00	0,00	0 %	Disnaker Perindag
	- Pemeliharaan Kontainer Sampah	20.000.000,00	20.000.000,00	100 %	Disnaker Perindag
15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	39.346.000,00	28.061.000,00	95,6 %	
	- Tera – Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	29.346.000,00	28.061.000,00	95,6 %	Disnaker Perindag
	- Pengadaan Plank Nama Instansi UPTD Metrologi	10.000.000,00	0,00	0 %	Disnaker Perindag

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2019 dalam rangka mempertanggungjawabkan dan mengukur kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019.

Terlepas dari keberhasilan yang diuraikan pada BAB III, kegagalan yang ada perlu segera ditindak lanjuti dengan mencari pemecahan permasalahannya, dan segera mengambil kebijakan untuk mensikapi kendala utama sehingga dapat memperbaiki kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu strategi atau langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan sesuai target yang ingin dicapai, perlu dilakukan :

1. Perencanaan program kegiatan secara komprehensif.
2. Penempatan dan penambahan personalia (SDM) secara proporsional sesuai analisa beban kerja, untuk instansi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.
3. Adanya anggaran dana yang cukup.
4. Tersedianya data yang valid.

Laporan ini diharapkan dapat dipakai dan dimanfaatkan untuk pimpinan, staf, dan masyarakat luas yang membutuhkannya. LKj Tahun 2019 ini juga akan digunakan sebagai alat observasi untuk melakukan instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.

Akhirnya dengan menyadari kekurangan yang ada, kiranya dapat memotivasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai untuk melakukan pembenahan dan perbaikan di tahun yang akan datang.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

1. Nama Organisasi : **Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai**
2. Tugas dan Kewajiban : Membantu Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan dan pasar
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar.
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Penempatan tenaga kerja	Orang	275	361	131,27 %
2.	Jumlah calon wirausaha baru	Orang	120	60	50 %
3.	Jumlah lowongan pekerjaan baru	Perusahaan	350	361	100 %
4.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Orang	1.050	2.064	196,57 %
5.	Jumlah kasus perselisihan industrial yang diselesaikan	Kasus	10	4	Menurun
6.	Terbitnya UMK	Ketetapan	1	1	100 %
7.	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan	Orang	250		
8.	Persentase pengembangan industri baru kreatif	Persen	3	2	2 %
9.	Jumlah produk IKM yang di promosikan	Produk	8	8	100 %
10.	Tersedianya data IKM	IKM	650	714	110 %
11.	Jumlah pasar yang direvitalisasi	Pasar	3	2	90 %

12.	Jumlah pasar dalam keadaan baik	Pasar	16	13	81,25 %
13.	Sampah pasar yang diangkut ke TPA	Persen	100	85	85 %
14.	Pengumpulan data informasi harga kebutuhan bahan pokok	Komoditi	34	34	100 %
15.	Jumlah produk unggulan yang dipasarkan	Produk	6	6	100 %
16.	Peningkatan penjualan hasil kerajinan IKM melalui kegiatan pameran	Persen	15	10	10 %
17.	Persentase realisasi retribusi pasar yang dipungut	Persen	100	51,56	51,56 %
18.	Terlaksananya kegiatan ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya	UTTP	2300	675	29,35 %



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TOBERTINA, SH
**Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOTA BINJAI**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H.M. IDAHAM, SH. M.Si
Jabatan : WALIKOTA BINJAI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2019 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 2019

Pihak Kedua,

H. M. IDAHAM, SH. M.Si.

Pihak Pertama,

TOBERTINA, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Administrasi dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelayanan administrasi perkantoran - Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan - Sarana dan prasarana yang terjaga dengan baik - Aset kantor yang layak fungsi - Penyusunan dokumen perencanaan tahunan tepat waktu - Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu 	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>3 Dokumen (Renja,RKPD,RKA)</p> <p>2 Dokumen (lap kinerja, lap. Keuangan)</p>
2.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan fungsi pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi ketenagakerjaan - Pelayanan terhadap pencari kerja dalam pembuatan AK1 s/d AK3 	<p>250 orang</p> <p>100 orang</p>
3.	Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja guna peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan terhadap perusahaan dan tenaga kerja - Terbitnya UMK 	<p>30 perusahaan</p> <p>1 Ketetapan</p>
4.	Membangun sarana perdagangan/pasar tradisional dan modern serta kawasan/sentra perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pasar yang direvitalisasi - Jumlah pasar dalam kondisi baik 	<p>1 Pasar</p> <p>3 Pasar</p>
5.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan pedagang pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Sampah pasar yang diangkut ke TPA 	<p>100 %</p>
6.	Meningkatnya promosi produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah produk unggulan yang di pasarkan - Penjualan hasil kerajinan IKM melalui kegiatan pameran 	<p>6 produk</p> <p>10 %</p>

7.	Meningkatkan retribusi pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kepada pedagang dalam penerbitan Kartu Pengenal Penyewa (KPP) - Persentase peningkatan retribusi pasar yang bisa di pungut 	<p>100 %</p> <p>1.655.164.237,00</p>
8.	Pengendalian stabilitas harga barang kebutuhan pokok	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data informasi harga bahan pokok - Pemberian subsidi kepada masyarakat pada tingkat lonjakan harga bahan pokok menjelang hari besar idul fitri 	<p>34 komoditi</p> <p>5 kecamatan</p>
9.	Melaksanakan pelayanan tera-tera ulang serta pengawasan UTTP	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya kegiatan ukuran timbangan dan perlengkapannya 	2259 UTTP

	Program / Kegiatan	Anggaran	Unit Pengelola	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	795.951.495,00	Disnaker Perindag	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.900.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	316.920.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	102.838.500,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23.046.700,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	68.600.295,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.026.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	70.620.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	80.000.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- BPJS Ketenagakerjaan Non PNS	25.000.000,00	Disnaker Perindag	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	414.899.200,00		

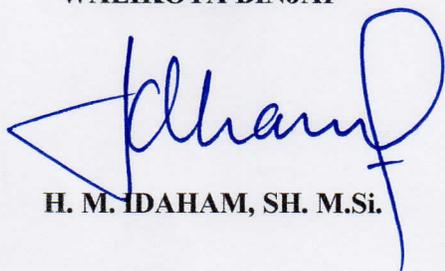
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8.138.200,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4.000.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	36.600.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	314.400.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	31.761.000,00	Disnaker Perindag	APBD
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	21.500.000,00	Disnaker Perindag	
	- Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari Tertentu	21.500.000,00	Disnaker Perindag	APBD
4.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	86.403..475,00		
	- Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	86.403.475,00	Disnaker Perindag	APBD
5.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	33.212.600,00		
	- Dewan Pengupahan	33.212.600,00	Disnaker Perindag	APBD
6.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.898.490.590,00		
	- Penyelenggaraan Promosi Dagang Tingkat Nasional (INACRAFT)	149.994.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Kegiatan Pameran Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	149.594.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Kegiatan Penyelenggaraan Stand Kota Binjai pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)	97.390.580,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Kegiatan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok Hari Besar Idul Fitri	216.879.770,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penertiban dan Pengelolaan Pasar	421.986.880,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Peningkatan Pelayanan Kebersihan Pasar	725.169.675,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pemberdayaan dan Penataan Pasar se Kota Binjai	137.475.685,00	Disnaker Perindag	APBD

7.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	29.346.000,00		
	- Tera – Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	29.346.000,00	Disnaker Perindag	APBD

Binjai,

2019

WALIKOTA BINJAI



H. M. IDAHAM, SH. M.Si.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI



**TOBERTINA, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611015 199203 2 002**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. M. Uzeir Nasution
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Tobertina, SH
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Tobertina, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19611015 199203 2 002

Pihak Pertama,

Sekretaris

Drs. M. Uzeir Nasution
Pembina Tk. I
Nip. 19650327 199303 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Administrasi dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelayanan administrasi perkantoran - Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan - Sarana dan prasarana yang terjaga dengan baik - Aset kantor yang layak fungsi - Penyusunan dokumen perencanaan tahunan tepat waktu - Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu 	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>3 Dokumen (Renja,RKPD,RKA)</p> <p>2 Dokumen (lap kinerja, lap. Keuangan)</p>

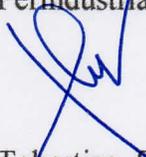
Program / Kegiatan	Anggaran	Unit Pengelola	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	729.179.300,00	Disnaker Perindag	
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.900.000,00	Disnaker Perindag	APBD
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.250.000,00	Disnaker Perindag	APBD
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	102.838.500,00	Disnaker Perindag	APBD
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23.046.700,00	Disnaker Perindag	APBD
- Penyediaan Alat Tulis Kantor	88.800.100,00	Disnaker Perindag	APBD
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.724.000,00	Disnaker Perindag	APBD
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	Disnaker Perindag	APBD
- Penyediaan Makanan dan Minuman	70.620.000,00	Disnaker Perindag	APBD
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	140.000.000,00	Disnaker Perindag	APBD
- BPJS Ketenagakerjaan Non PNS	25.000.000,00	Disnaker Perindag	APBD

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	485.643.395,00		
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	37.000.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	36.600.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	360.282.395,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	31.761.000,00	Disnaker Perindag	APBD
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	21.500.000,00	Disnaker Perindag	
	- Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari tertentu	21.500.00,00	Disnaker Perindag	APBD

Binjai, Januari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Perdagangan Kota Binjai


Tobertina, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19611015 199203 2 002

Pihak Pertama,

Sekretaris


Drs. M. Uzeir Nasution
Pembina Tk. I
Nip. 19650327 199303 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG KETENAGAKERJAAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratnawaty Saragih, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Perdagangan Kota Binjai

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Tobertina, SH
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Tobertina, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19611015 199203 2 002

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Ketenagakerjaan

Ratnawati Saragih, S.Sos
Pembina
Nip. 19670811 198903 2 005

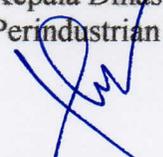
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG KETENAGAKERJAAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	- Pelayanan terhadap pencari kerja dalam pembuatan AK1, AK2, AK3 dan rekom paspor	1.100 lembar
2.	Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja agar meningkatnya jaminan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	- Terbitnya UMK - Pengawasan terhadap perusahaan dan tenaga kerja	1 ketetapan 30 perusahaan

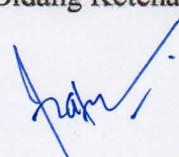
	Program / Kegiatan	Anggaran	Unit Pengelola	Keterangan
1.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	86.403.475,00		
	- Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	86.403.475,00	Disnaker Perindag	APBD
2.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	33.212.600,00		
	- Dewan Pengupahan	33.212.600,00	Disnaker Perindag	APBD

Binjai, Januari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Perdagangan Kota Binjai


Tobertina, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19611015 199203 2 002

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Ketenagakerjaan


Ratnawati Saragih, S.Sos
Pembina
Nip. 19670811 198903 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG PERINDUSTRIAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARDIANA, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Perindustrian Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Perdagangan Kota Binjai

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TOBERTINA, SH
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

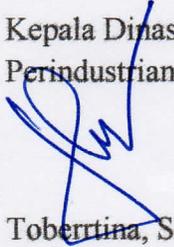
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, April 2019

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Perdagangan Kota Binjai


Tobertina, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19611015 199203 2 002

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Perindustrian


Mardiana, SE, MM
Pembina
Nip. 19740327 199803 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG PERINDUSTRIAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah wirausaha baru di sektor industri kreatif	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan industri baru kreatif - Jumlah rumah kemasan yang direvitalisasi - Jumlah gedung produksi yang direvitalisasi - Penambahan dan peralatan rumah kemasan dan rumah produksi 	100 % 1 gedung 1 gedung 20 unit

	Program / Kegiatan	Anggaran	Unit Pengelola	Keterangan
1.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	413.730.105,00		
	- Revitalisasi Rumah Kemasan	600.000.000,00	Disnaker Perindag	DAK
	- Revitalisasi Gedung Produksi	600.000.000,00	Disnaker Perindag	DAK
	- Pengadaan Mesin dan Peralatan	357.850.000,00	Disnaker Perindag	DAK
	- Penunjang Administrasi DAK Revitalisasi Sentra IKM	23.400.000,00	Disnaker Perindag	DAK

Binjai, April 2019

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Toberrtina, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19611015 199203 2 002

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Perindustrian

Mardiana, SE, MM
Pembina
Nip. 19740327 199803 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG PERDAGANGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hotlan Jaya Sitorus, SH
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Perdagangan Kota Binjai

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Tobertina, SH
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

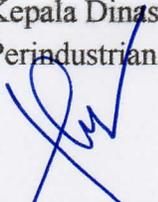
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Perdagangan Kota Binjai


Tobertina, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19611015 199203 2 002

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Perdagangan


Hotlan Jaya Sitorus, SH
Penata TK. I
Nip. 19740314 199602 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG PERDAGANGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun sarana perdagangan/pasar tradisional dan modern serta kawasan/sentra perdagangan	- Jumlah pasar yang direvitalisasi - Jumlah pasar dalam kondisi baik	4 Pasar 3 Pasar
2.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan pedagang pasar	- Sampah pasar yang diangkut ke TPA	100 %
3.	Meningkatnya promosi produk unggulan daerah	- Jumlah produk unggulan yang di pasarkan	6 produk
4.	Meningkatkan retribusi pasar	- Pelayanan kepada pedagang dalam penerbitan Kartu Pengenal Penyewa (KPP) - Persentase peningkatan retribusi pasar yang bisa di pungut	100 % 51,13 %
5.	Pengendalian stabilitas harga barang kebutuhan pokok	- Pengumpulan data - Pemberian subsidi	34 komoditi 5 kecamatan
6.	Melaksanakan pelayanan tera-tera ulang serta pengawasan UTTP	- Pembentukan UPTD Metrologi Legal	1 ketetapan

	Program / Kegiatan	Anggaran	Unit Pengelola	Keterangan
1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.004.518.590,00		
	- Penyelenggaraan Promosi Dagang Tingkat Nasional (INACRAFT)	149.994.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Kegiatan Pameran Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh	149.594.000,00	Disnaker Perindag	APBD

	Indonesia (APEKSI)			
	- Kegiatan Penyelenggaraan Stand Kota Binjai pada Pekan Raya Sumatera Utara	97.390.580,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Kegiatan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok Hari Besar Idul Fitri	216.879.770,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penertiban dan Pengelolaan Pasar	426.474.880,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Peningkatan Pelayanan Kebersihan Pasar	725.169.675,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pemberdayaan dan Penataan Pasar se Kota Binjai	137.475.685,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Revitalisasi Pasar Rakyat	903.866.000,00	Disnaker Perindag	DAK
	- Penunjang Administrasi DAK Revitalisasi Pasar Rakyat	4.100.000,00	Disnaker Perindag	DAK
	- Pembuatan Kontainer Sampah	81.540.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pemeliharaan Kontainer Sampah	20.000.000,00	Disnaker Perindag	APBD
2	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	39.346.000,00		
	- Tera – Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	29.346.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penyediaan Saran dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal	1.269.500.000,00	Disnaker Perindag	DAK
	- Penunjang Administrasi DAK Penyediaan Sarana dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal	20.500.000,00	Disnaker Perindag	DAK
	- Pengadaan Plank Nama Instansi UPTD Metrologi	10.000.000,00	Disnaker Perindag	APBD

Binjai, Januari 2019

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Tobertina, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19611015 199203 2 002

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Perdagangan

Hotlan Jaya Sitorus, SH
Penata TK. I
Nip. 19740314 199602 1 001